



**BUPATI MOROWALI UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI  
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOROWALI UTARA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintah menjadi kewenangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PDPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharan Umum Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
14. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II  
ALOKASI DANA DESA  
Pasal 2

- (1) ADD Tahun Anggaran 2023 adalah dana yang bersumber dari 10% (sepuluh persen) dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi DAK yang merupakan bagian dari bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (3) ADD dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.

- (4) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang merupakan bagian APBdesa.
- (5) ADD dialokasikan sebagaimana dimaksud ayat (3) berjumlah Rp.78.329.651.000,- (Tujuh Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

BAB III  
TATA CARA PENGANGGARAN  
ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) ADD dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja ADD dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA CARA PENGALOKASIAN  
ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD sebesar 10% (Sepuluh Persen) total dana perimbangan Kabupaten setelah dikurangi DAK.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada 122 (seratus dua puluh dua) Desa yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan di Daerah dengan mempertimbangkan :
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa;
  - c. luas wilayah Desa;
  - d. angka kemiskinan Desa; dan
  - e. tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kependudukan dan bidang statistik.

Pasal 5

- (1) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung dengan formulasi :
  - a. pertimbangan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 90% (Sembilan Puluh Persen) untuk pembagian merata dengan mempertimbangkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Aparat Desa; dan

- b. 10% (Sepuluh Persen) untuk jumlah penduduk, luas wilayah Desa, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis Desa berdasarkan bobot formulasi setiap Desa.
- (2) Bobot formulasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jumlah penduduk, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis, angka kemiskinan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
  - 40% (empat puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
  - 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah Desa; dan
  - 40% (empat puluh lima persen) untuk Indeks Kesulitan Geografis Desa.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d merupakan besaran nilai ADD Desa setiap Desa.

$$W = (0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk Desa.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap penduduk terhadap luas wilayah Desa.

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG Desa.

## Pasal 6

Perhitungan dan penetapan besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

Nilai ADD setiap Desa menjadi salah satu pendapatan Desa yang harus dimasukkan didalam Dokumen APBDDesa.

## BAB V

### MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

## Pasal 8

- (1) Mekanisme Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum, Daerah ke Rekening Kas Desa.

(2) Penyaluran ADD dilakukan tiga tahap dari alokasi masing-masing Desa dengan ketentuan :

- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke- 3 bulan Juni;
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Agustus; dan
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan September.

## Pasal 9

Persyaratan Pencairan ADD sebagai berikut :

1. Untuk Tahap I dapat diajukan dengan melampirkan yaitu :
  - a. surat pengantar dari Kecamatan;
  - b. peraturan Desa tentang APBDesa;
  - c. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
  - d. peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  - e. peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa 2022 disertai dengan :
    - 1) laporan keuangan, terdiri atas:
      - a. laporan realisasi APB Desa; dan
      - b. catatan atas laporan keuangan.
    - 2) laporan realisasi kegiatan; dan
    - 3) daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa .
  - f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 yang terdiri dari:
    - 1) rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
    - 2) rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
    - 3) rencana Anggaran Biaya ;
  - g. peraturan Desa tentang Penyertaan Modal jika tersedia;
  - h. berita Acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
  - i. berita acara hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
  - j. keputusan Camat tentang Hasil evaluasi APBDesa;
  - k. laporan dokumentasi pekerjaan fisik (Foto 0,50 % dan 100 %) dan pengadaan asset Tahun 2022;
  - l. laporan entri Data Profil Desa Tahun 2022 yang berisi Data Pokok Tahunan, laporan Potensi dan Perkembangan dan entri Data Epdeskel 2022;
  - m. data Aset Desa melalui Aplikasi SIPADES 2022; dan

- n. data Perkembangan BUMDes 2022.
2. Untuk Tahap II, dapat diajukan dengan melampirkan yaitu :
    - a. laporan realisasi Tahap I sudah mencapai 35 %;
    - b. realisasi pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masing-masing desa telah mencapai 50 %;
    - c. bukti pembayaran Pajak Negara;
    - d. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
    - e. surat bebas temuan di Inspektorat.
  3. Untuk Tahap III, dapat diajukan melampirkan yaitu :
    - a. laporan realisasi Tahap II sudah mencapai 75 %;
    - b. realisasi pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masing-masing desa telah mencapai 85 %; dan
    - c. entri data profil desa dan epdeskel Tahun 2023 sudah mencapai 80 %.

BAB VI  
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN  
ALOKASI DANA DESA  
Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Anggaran ADD melalui belanja transfer didasarkan pada APBD.
- (2) Anggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Dokumen APBDesa setiap tahun anggaran.
- (3) APBdesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 11

- (1) Pencairan ADD terintegrasi dengan pencairan APBDesa.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
  - a. nomor rekening bank pemerintah desa yang menerima ADD;
  - b. pakta integritas; dan
  - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
- (4) Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan, pertahapan dan atau total pagu per 12 (dua belas) dari nilai pagu per desa.
- (5) Format pakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN  
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA  
Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dengan rincian sebagai berikut :
  - a. asli untuk arsip Pemerintah Desa;
  - b. 1 (satu) rangkap fotokopi untuk Kecamatan;
  - c. 1 (satu) rangkap fotokopi untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - d. 1 (satu) rangkap fotokopi untuk Inspektorat Daerah.
- (3) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan ADD yang diterimanya.
- (4) Pemerintah Desa menyampaikan pertanggungjawaban ADD paling lambat bulan Maret Tahun 2024.

Pasal 13

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian ADD kepada Pemerintah Desa meliputi:

- a. dokumen APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; dan
- b. bukti SP2D, bukti transfer uang dan kwitansi bukti penerimaan uang.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD.
- (2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Kabupaten.
- (4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya didalam APBDesa, Pemerintah Daerah dapat menunda dan/atau menahan pencairan tahap berikutnya sampai dengan diselesaikannya hasil temuan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Desa.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale  
pada tanggal 24 Februari 2023

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale  
pada tanggal 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Morowali Utara,



BETSI A. POMBALAWO, SH  
NIP.19780121 200604 2 027

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN  
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

**A. ADD Berdasarkan Formula**

NO	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA TIAP DESA			
		ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA	NOMOR REKENING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)	
<b>I</b>	<b>KECAMATAN PETASIA</b>				
1	GANDA-GANDA	577.841.687	94.969.224	672.810.911	401.02.02.01528-1
2	KOYA	577.841.687	71.106.473	648.948.160	401.02.02.01533-3
3	GILILANA	577.841.687	65.761.275	643.602.962	401.02.02.01529-2
4	TANAUGE	577.841.687	66.862.961	644.704.648	401.02.02.01539-5
5	KOROLOLAKI	577.841.687	63.679.115	641.520.802	401.02.02.01592-1
6	KOROLOLAMA	577.841.687	64.200.793	642.042.480	401.02.02.01563-2
7	KOROMATANTU	577.841.687	71.636.318	649.478.005	401.02.02.01532-0
<b>II</b>	<b>KECAMATAN PETASIA TIMUR</b>				
1	BUNTA	577.841.687	283.528.527	861.370.214	401.02.02.01525-4
2	TOMPIRA	577.841.687	123.033.234	700.874.921	401.02.02.01605-2
3	BUNGINTIMBE	577.841.687	167.334.448	745.176.135	401.02.02.01524-2
4	TOWARA	577.841.687	84.825.186	662.666.873	401.02.02.01550-3
5	MOLINO	577.841.687	72.145.638	649.987.325	401.02.02.01572-3
6	MOHONI	577.841.687	66.605.503	644.447.190	401.02.02.01538-3
7	UNGKEA	577.841.687	67.655.745	645.497.432	401.02.02.01544-8
8	BIMOR JAYA	577.841.687	65.386.409	643.228.096	401.02.02.01522-8
9	MOLORES	577.841.687	60.654.212	638.495.899	401.02.02.01540-1
10	KEUNO	577.841.687	47.913.632	625.755.319	401.02.02.01531-9
11	TOWARA PANTAI	577.841.687	45.477.127	623.318.814	401.02.02.01620-8
12	PEBOA	577.841.687	53.798.893	631.640.580	401.02.02.01616-7
<b>III</b>	<b>KECAMATAN LEMBO RAYA</b>				
1	DOLUPO KARYA	577.841.687	67.148.652	644.990.339	401.02.02.01526-6
2	PO'ONA	577.841.687	39.393.388	617.235.075	401.02.02.01637-5
3	PETUMBEA	577.841.687	44.177.465	622.019.152	401.02.02.01543-6
4	RONTA	577.841.687	46.477.682	624.319.369	401.02.02.01638-7
5	PONTANGOA	577.841.687	49.651.130	627.492.817	401.02.02.01636-3
6	JAMOR JAYA	577.841.687	54.441.370	632.283.057	401.02.02.01624-6
7	PA'AWARU	577.841.687	50.491.806	628.333.493	401.02.02.01635-0
8	LEMBOBELALA	577.841.687	39.612.255	617.453.942	401.02.02.01631-3
9	BINTANGOR MUKTI	577.841.687	50.929.514	628.771.201	401.02.02.01523-1
10	MANDULA	577.841.687	54.361.439	632.203.126	401.02.02.01633-7
<b>IV</b>	<b>KECAMATAN LEMBO</b>				
1	BETELEME	577.841.687	85.327.148	663.168.835	401.02.02.01623-4
2	ULUANSO	577.841.687	37.998.875	615.840.562	401.02.02.01641-6
3	MORA	577.841.687	39.328.695	617.170.382	401.02.02.01634-9
4	WARAA	577.841.687	49.450.028	627.291.715	401.02.02.01641-6
5	TINGKEAO	577.841.687	50.116.362	627.958.049	401.02.02.01639-9
6	WAWOPADA	577.841.687	48.358.681	626.200.368	401.02.02.01643-1
7	KOROWALELO	577.841.687	58.150.439	635.992.126	401.02.02.01627-2
8	TINOMPO	577.841.687	74.276.320	652.118.007	401.02.02.01640-4
9	KUMPI	577.841.687	37.224.765	615.066.452	401.02.02.01629-6
10	KOROMPEELI	577.841.687	44.982.105	622.823.792	401.02.02.01626-1
11	LEMBOROMA	577.841.687	53.358.018	631.199.705	401.02.02.01632-5
12	KOROWOU	577.841.687	113.059.617	690.901.304	401.02.02.01628-4
13	LEMBOBARU	577.841.687	30.075.746	607.917.433	401.02.02.01630-0
14	KOROBONDE	577.841.687	55.265.438	633.107.125	401.02.02.01625-8
<b>V</b>	<b>KECAMATAN MORI ATAS</b>				
1	TOMATA	577.841.687	51.219.174	629.060.861	401.02.02.01604-1
2	LONDI	577.841.687	61.676.986	639.518.673	401.02.02.01567-1
3	TAENDE	577.841.687	78.550.246	656.391.933	401.02.02.01587-6
4	ENSA	577.841.687	50.504.031	628.345.718	401.02.02.01555-3
5	KOLAKA	577.841.687	42.912.657	620.754.344	401.02.02.01559-0
6	PEONEA	577.841.687	72.085.766	649.927.453	401.02.02.01542-4
7	LANUMOR	577.841.687	56.329.422	634.171.109	401.02.02.01534-5
8	GONTARA	577.841.687	40.337.866	618.179.553	401.02.02.01557-7
9	LEE	577.841.687	40.989.095	618.830.782	401.02.02.01535-7
10	SAEMBA	577.841.687	65.880.937	643.722.624	401.02.02.01545-1
11	KASINGOLI	577.841.687	52.157.565	629.999.252	401.02.02.01530-7
12	TOMUI KARYA	577.841.687	45.070.420	622.912.107	401.02.02.01606-4
13	SAEMBA WALATI	577.841.687	41.537.623	619.379.310	401.02.02.01617-9
14	PAMBAREA	577.841.687	47.174.215	625.015.902	401.02.02.01614-3
<b>VI</b>	<b>KECAMATAN MORI UTARA</b>				
1	ERA	577.841.687	71.023.942	648.865.629	401.02.02.01527-8
2	PELERU	577.841.687	80.109.547	657.951.234	401.02.02.01578-5
3	TAMONJENGI	577.841.687	54.914.996	632.756.683	401.02.02.01546-2
4	MAYUMBA	577.841.687	54.609.847	632.451.534	401.02.02.01516-3
5	TIWA'A	577.841.687	41.629.917	619.471.604	401.02.02.01560-6
6	LEMBONTONARA	577.841.687	85.505.184	663.346.871	401.02.02.01536-9
7	TABARANO	577.841.687	43.749.777	621.591.464	401.02.02.01586-4
8	WAWONDULA	577.841.687	71.531.262	649.372.949	401.02.02.01551-5

<b>VII</b>	<b>KECAMATAN SOYO JAYA</b>				
1	LEMBAH SUMARA	577.841.687	53.367.997	631.209.684	401.02.02.01564-4
2	SUMARA JAYA	577.841.687	42.166.246	620.007.933	401.02.02.01585-2
3	TAMBAYOLI	577.841.687	71.640.166	649.481.853	401.02.02.01591-7
4	MALINO	577.841.687	47.359.638	625.201.325	401.02.02.01572-3
5	PANCA MAKMUR	577.841.687	67.970.499	645.812.186	401.02.02.01575-9
6	TAMAINUSI	577.841.687	72.818.988	650.660.675	401.02.02.01588-8
7	BAU	577.841.687	66.216.870	644.058.557	401.02.02.01553-9
8	MALINO JAYA	577.841.687	54.462.303	632.303.990	401.02.02.01569-4
9	TODDOPOLI UEBANGKE	577.841.687	43.307.852	621.149.539	401.02.02.01619-3
10	TANDOYONDO	577.841.687	52.414.980	630.256.667	401.02.02.01596-7
<b>VIII</b>	<b>KECAMATAN BUNGKU UTARA</b>				
1	BATURUBE	577.841.687	65.946.486	643.788.173	401.02.02.01552-7
2	POSANGKE	577.841.687	89.154.309	666.995.996	401.02.02.01579-7
3	TARONGGO	577.841.687	84.294.119	662.135.806	401.02.02.01597-9
4	UERURU	577.841.687	41.377.229	619.218.916	401.02.02.01610-5
5	UEWAJO	577.841.687	75.792.578	653.634.265	401.02.02.01609-1
6	TIRONGAN BAWAH	577.841.687	69.711.111	647.552.798	401.02.02.01598-0
7	TIRONGAN ATAS	577.841.687	71.020.739	648.862.426	401.02.02.01601-4
8	SILITI	577.841.687	64.103.573	641.945.260	401.02.02.01584-1
9	LEMO	577.841.687	53.636.929	631.478.616	401.02.02.01565-6
10	SALUBIRO	577.841.687	131.531.834	709.373.521	401.02.02.01582-6
11	UEMASI	577.841.687	60.554.454	638.396.141	401.02.02.01607-6
12	OPO	577.841.687	70.504.876	648.346.563	401.02.02.01600-2
13	TANAKURAYA	577.841.687	57.371.886	635.213.573	401.02.02.01592-9
14	TAMBAROBONE	577.841.687	55.576.579	633.418.266	401.02.02.01590-5
15	WOOMPARI	577.841.687	51.974.951	629.816.638	401.02.02.01612-9
16	BOBA	577.841.687	51.011.599	628.853.286	401.02.02.01554-0
17	KALOMBANG	577.841.687	57.019.414	634.861.101	401.02.02.01558-9
18	TOKONANAKA	577.841.687	61.182.063	639.023.750	401.02.02.01603-8
19	MATUBE	577.841.687	62.225.231	640.066.918	401.02.02.01570-9
20	LEMOWALIA	577.841.687	68.343.239	646.184.926	401.02.02.01613-0
21	UEMPANAPA	577.841.687	58.530.609	636.372.296	401.02.02.01621-1
22	TOKALA ATAS	577.841.687	83.495.500	661.337.187	401.02.02.01602-6
23	POKEANG	577.841.687	58.901.860	636.743.547	401.02.02.01615-5
<b>IX</b>	<b>KECAMATAN MAMOSALATO</b>				
1	PANDAUKE	577.841.687	78.196.614	656.038.301	401.02.02.01576-0
2	KOLO BAWAH	577.841.687	83.744.549	661.586.236	401.02.02.01599-3
3	KOLO ATAS	577.841.687	67.539.662	645.381.349	401.02.02.01561-8
4	MOMO	577.841.687	62.586.785	640.428.472	401.02.02.01573-5
5	TANANAGAYA	577.841.687	64.353.616	642.195.303	401.02.02.01593-0
6	UEPAKATU	577.841.687	63.143.001	640.984.688	401.02.02.01608-8
7	LJJO	577.841.687	56.862.966	634.704.653	401.02.02.01566-8
8	TANASUMPU	577.841.687	76.148.350	653.990.037	401.02.02.01594-3
9	PARANGISI	577.841.687	61.181.199	639.022.886	401.02.02.01577-3
10	GIRIMULYA	577.841.687	47.909.003	625.750.690	401.02.02.01556-5
11	WINANGOBINO	577.841.687	90.626.720	668.468.407	401.02.02.01611-7
12	TAMBALE	577.841.687	46.687.211	624.528.898	401.02.02.01589-1
13	SEA	577.841.687	84.868.613	662.710.300	401.02.02.01583-8
14	MENYO'E	577.841.687	98.048.558	675.890.245	401.02.02.01571-0
<b>X</b>	<b>KECAMATAN PETASIA BARAT</b>				
1	TIU	577.841.687	71.508.341	649.350.028	401.02.02.01547-4
2	TONTOWEA	577.841.687	68.152.923	645.994.610	401.02.02.01549-8
3	TOGO MULYO	577.841.687	67.687.808	645.529.495	401.02.02.01548-6
4	MARALEE	577.841.687	48.088.386	625.930.073	401.02.02.01537-0
5	MONDOWE	577.841.687	59.781.441	637.623.128	401.02.02.01541-2
6	SAMPALOWO	577.841.687	50.310.027	628.151.714	401.02.02.01581-4
7	MOLEONO	577.841.687	57.366.652	635.208.339	401.02.02.01539-5
8	ONEPUTE	577.841.687	62.863.558	640.705.245	401.02.02.01574-7
9	ULU LAA	577.841.687	47.590.174	625.431.861	401.02.02.01622-2
10	TADAKU JAYA	577.841.687	43.000.199	620.841.886	401.02.02.01618-0
	<b>Total</b>	<b>70.496.685.814</b>	<b>7.832.965.186</b>	<b>78.329.651.000</b>	

**B. ADD Berdasarkan Pertaahapan**

NO	NAMA DESA	PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA				NOMOR REKENING
		ALOKASI DANA DESA	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%	
<b>I</b>	<b>KECAMATAN PETASIA</b>					
1	GANDA-GANDA	672.810.911	269.124.364	269.124.364	134.562.182	401.02.02.01528-1
2	KOYA	648.948.160	259.579.264	259.579.264	129.789.632	401.02.02.01533-3
3	GILILANA	643.602.962	257.441.185	257.441.185	128.720.592	401.02.02.01529-2
4	TANAUGE	644.704.648	257.881.859	257.881.859	128.940.930	401.02.02.01539-5
5	KOROLOLAKI	641.520.802	256.608.321	256.608.321	128.304.160	401.02.02.01592-1
6	KOROLOLAMA	642.042.480	256.816.992	256.816.992	128.408.496	401.02.02.01563-2
7	KOROMATANTU	649.478.005	259.791.202	259.791.202	129.895.601	401.02.02.01532-0
<b>II</b>	<b>KECAMATAN PETASIA TIMUR</b>					
1	BUNTA	861.370.214	344.548.085	344.548.085	172.274.043	401.02.02.01525-4
2	TOMPIRA	700.874.921	280.349.968	280.349.968	140.174.984	401.02.02.01605-2
3	BUNGINTIMBE	745.176.135	298.070.454	298.070.454	149.035.227	401.02.02.01524-2
4	TOWARA	662.666.873	265.066.749	265.066.749	132.533.375	401.02.02.01550-3
5	MOLINO	649.987.325	259.994.930	259.994.930	129.997.465	401.02.02.01572-3
6	MOHONI	644.447.190	257.778.876	257.778.876	128.889.438	401.02.02.01538-3
7	UNGKEA	645.497.432	258.198.973	258.198.973	129.099.486	401.02.02.01544-8
8	BIMOR JAYA	643.228.096	257.291.238	257.291.238	128.645.619	401.02.02.01522-8
9	MOLORES	638.495.899	255.398.360	255.398.360	127.699.180	401.02.02.01540-1
10	KEUNO	625.755.319	250.302.128	250.302.128	125.151.064	401.02.02.01531-9
11	TOWARA PANTAI	623.318.814	249.327.526	249.327.526	124.663.763	401.02.02.01620-8
12	PEBOA	631.640.580	252.656.232	252.656.232	126.328.116	401.02.02.01616-7
<b>III</b>	<b>KECAMATAN LEMBO RAYA</b>					
1	DOLUPO KARYA	644.990.339	257.996.136	257.996.136	128.998.068	401.02.02.01526-6
2	PO'ONA	617.235.075	246.894.030	246.894.030	123.447.015	401.02.02.01637-5
3	PETUMBEA	622.019.152	248.807.661	248.807.661	124.403.830	401.02.02.01543-6
4	RONTA	624.319.369	249.727.748	249.727.748	124.863.874	401.02.02.01638-7
5	PONTANGO	627.492.817	250.997.127	250.997.127	125.498.563	401.02.02.01636-3
6	JAMOR JAYA	632.283.057	252.913.223	252.913.223	126.456.611	401.02.02.01624-6
7	PA'AWARU	628.333.493	251.333.397	251.333.397	125.666.699	401.02.02.01635-0
8	LEMBOBELALA	617.453.942	246.981.577	246.981.577	123.490.788	401.02.02.01631-3
9	BINTANGOR MUKTI	628.771.201	251.508.480	251.508.480	125.754.240	401.02.02.01523-1
10	MANDULA	632.203.126	252.881.250	252.881.250	126.440.625	401.02.02.01633-7
<b>IV</b>	<b>KECAMATAN LEMBO</b>					
1	BETELEME	663.168.835	265.267.534	265.267.534	132.633.767	401.02.02.01623-4
2	ULUANSO	615.840.562	246.336.225	246.336.225	123.168.112	401.02.02.01641-6
3	MORA	617.170.382	246.868.153	246.868.153	123.434.076	401.02.02.01634-9
4	WARAA	627.291.715	250.916.686	250.916.686	125.458.343	401.02.02.01641-6
5	TINGKEAO	627.958.049	251.183.220	251.183.220	125.591.610	401.02.02.01639-9
6	WAWOPADA	626.200.368	250.480.147	250.480.147	125.240.074	401.02.02.01643-1
7	KOROWALELO	635.992.126	254.396.850	254.396.850	127.198.425	401.02.02.01627-2
8	TINOMPO	652.118.007	260.847.203	260.847.203	130.423.601	401.02.02.01640-4
9	KUMPI	615.066.452	246.026.581	246.026.581	123.013.290	401.02.02.01629-6
10	KOROMPEELI	622.823.792	249.129.517	249.129.517	124.564.758	401.02.02.01626-1
11	LEMBOROMA	631.199.705	252.479.882	252.479.882	126.239.941	401.02.02.01632-5
12	KOROWOU	690.901.304	276.360.522	276.360.522	138.180.261	401.02.02.01628-4
13	LEMBOBARU	607.917.433	243.166.973	243.166.973	121.583.487	401.02.02.01630-0
14	KOROBONDE	633.107.125	253.242.850	253.242.850	126.621.425	401.02.02.01625-8
<b>V</b>	<b>KECAMATAN MORI ATAS</b>					
1	TOMATA	629.060.861	251.624.345	251.624.345	125.812.172	401.02.02.01604-1
2	LONDI	639.518.673	255.807.469	255.807.469	127.903.735	401.02.02.01567-1
3	TAENDE	656.391.933	262.556.773	262.556.773	131.278.387	401.02.02.01587-6
4	ENSA	628.345.718	251.338.287	251.338.287	125.669.144	401.02.02.01555-3
5	KOLAKA	620.754.344	248.301.738	248.301.738	124.150.869	401.02.02.01559-0
6	PEONEA	649.927.453	259.970.981	259.970.981	129.985.491	401.02.02.01542-4
7	LANUMOR	634.171.109	253.668.443	253.668.443	126.834.222	401.02.02.01534-5
8	GONTARA	618.179.553	247.271.821	247.271.821	123.635.911	401.02.02.01557-7
9	LEE	618.830.782	247.532.313	247.532.313	123.766.156	401.02.02.01535-7
10	SAEMBA	643.722.624	257.489.050	257.489.050	128.744.525	401.02.02.01545-1
11	KASINGOLI	629.999.252	251.999.701	251.999.701	125.999.850	401.02.02.01530-7
12	TOMUI KARYA	622.912.107	249.164.843	249.164.843	124.582.421	401.02.02.01606-4
13	SAEMBA WALATI	619.379.310	247.751.724	247.751.724	123.875.862	401.02.02.01617-9
14	PAMBAREA	625.015.902	250.006.361	250.006.361	125.003.180	401.02.02.01614-3
<b>VI</b>	<b>KECAMATAN MORI UTARA</b>					
1	ERA	648.865.629	259.546.251	259.546.251	129.773.126	401.02.02.01527-8
2	PELERU	657.951.234	263.180.494	263.180.494	131.590.247	401.02.02.01578-5
3	TAMONJENGI	632.756.683	253.102.673	253.102.673	126.551.337	401.02.02.01546-2
4	MAYUMBA	632.451.534	252.980.614	252.980.614	126.490.307	401.02.02.01516-3
5	TIWA'A	619.471.604	247.788.642	247.788.642	123.894.321	401.02.02.01560-6
6	LEMBONTONARA	663.346.871	265.338.749	265.338.749	132.669.374	401.02.02.01536-9
7	TABARANO	621.591.464	248.636.586	248.636.586	124.318.293	401.02.02.01586-4
8	WAWONDULA	649.372.949	259.749.180	259.749.180	129.874.590	401.02.02.01551-5
<b>VII</b>	<b>KECAMATAN SOYO JAYA</b>					
1	LEMBAH SUMARA	631.209.684	252.483.873	252.483.873	126.241.937	401.02.02.01564-4
2	SUMARA JAYA	620.007.933	248.003.173	248.003.173	124.001.587	401.02.02.01585-2
3	TAMBAYOLI	649.481.853	259.792.741	259.792.741	129.896.371	401.02.02.01591-7
4	MALINO	625.201.325	250.080.530	250.080.530	125.040.265	401.02.02.01572-3
5	PANCA MAKMUR	645.812.186	258.324.874	258.324.874	129.162.437	401.02.02.01575-9
6	TAMAINUSI	650.660.675	260.264.270	260.264.270	130.132.135	401.02.02.01588-8
7	BAU	644.058.557	257.623.423	257.623.423	128.811.711	401.02.02.01553-9
8	MALINO JAYA	632.303.990	252.921.596	252.921.596	126.460.798	401.02.02.01569-4
9	TODDOPOLI UEBANGKE	621.149.539	248.459.816	248.459.816	124.229.908	401.02.02.01619-3
10	TANDOYONDO	630.256.667	252.102.667	252.102.667	126.051.333	401.02.02.01596-7

<b>VIII</b>	<b>KECAMATAN BUNGKU UTARA</b>					
1	BATURUBE	643.788.173	257.515.269	257.515.269	128.757.635	401.02.02.01552-7
2	POSANGKE	666.995.996	266.798.398	266.798.398	133.399.199	401.02.02.01579-7
3	TARONGGO	662.135.806	264.854.323	264.854.323	132.427.161	401.02.02.01597-9
4	UERURU	619.218.916	247.687.566	247.687.566	123.843.783	401.02.02.01610-5
5	UEWAJO	653.634.265	261.453.706	261.453.706	130.726.853	401.02.02.01609-1
6	TIRONGAN BAWAH	647.552.798	259.021.119	259.021.119	129.510.560	401.02.02.01598-0
7	TIRONGAN ATAS	648.862.426	259.544.971	259.544.971	129.772.485	401.02.02.01601-4
8	SILITI	641.945.260	256.778.104	256.778.104	128.389.052	401.02.02.01584-1
9	LEMO	631.478.616	252.591.447	252.591.447	126.295.723	401.02.02.01565-6
10	SALUBIRO	709.373.521	283.749.408	283.749.408	141.874.704	401.02.02.01582-6
11	UEMASI	638.396.141	255.358.456	255.358.456	127.679.228	401.02.02.01607-6
12	OPO	648.346.563	259.338.625	259.338.625	129.669.313	401.02.02.01600-2
13	TANAKURAYA	635.213.573	254.085.429	254.085.429	127.042.715	401.02.02.01592-9
14	TAMBAROBONE	633.418.266	253.367.306	253.367.306	126.683.653	401.02.02.01590-5
15	WOOMPARI	629.816.638	251.926.655	251.926.655	125.963.328	401.02.02.01612-9
16	BOBA	628.853.286	251.541.315	251.541.315	125.770.657	401.02.02.01554-0
17	KALOMBANG	634.861.101	253.944.440	253.944.440	126.972.220	401.02.02.01558-9
18	TOKONANAKA	639.023.750	255.609.500	255.609.500	127.804.750	401.02.02.01603-8
19	MATUBE	640.066.918	256.026.767	256.026.767	128.013.384	401.02.02.01570-9
20	LEMOWALIA	646.184.926	258.473.970	258.473.970	129.236.985	401.02.02.01613-0
21	UEMPANAPA	636.372.296	254.548.919	254.548.919	127.274.459	401.02.02.01621-1
22	TOKALA ATAS	661.337.187	264.534.875	264.534.875	132.267.437	401.02.02.01602-6
23	POKEANG	636.743.547	254.697.419	254.697.419	127.348.709	401.02.02.01615-5
<b>IX</b>	<b>KECAMATAN MAMOSALATO</b>					
1	PANDAUKE	656.038.301	262.415.320	262.415.320	131.207.660	401.02.02.01576-0
2	KOLO BAWAH	661.586.236	264.634.494	264.634.494	132.317.247	401.02.02.01599-3
3	BOBA	645.381.349	258.152.540	258.152.540	129.076.270	401.02.02.01561-8
4	MOMO	640.428.472	256.171.389	256.171.389	128.085.694	401.02.02.01573-5
5	TANANAGAYA	642.195.303	256.878.121	256.878.121	128.439.061	401.02.02.01593-0
6	UEPAKATU	640.984.688	256.393.875	256.393.875	128.196.938	401.02.02.01608-8
7	LJO	634.704.653	253.881.861	253.881.861	126.940.931	401.02.02.01566-8
8	TANASUMPU	653.990.037	261.596.015	261.596.015	130.798.007	401.02.02.01594-3
9	PARANGISI	639.022.886	255.609.154	255.609.154	127.804.577	401.02.02.01577-3
10	GIRIMULYA	625.750.690	250.300.276	250.300.276	125.150.138	401.02.02.01556-5
11	WINANGOBINO	668.468.407	267.387.363	267.387.363	133.693.681	401.02.02.01611-7
12	TAMBALE	624.528.898	249.811.559	249.811.559	124.905.780	401.02.02.01589-1
13	SEA	662.710.300	265.084.120	265.084.120	132.542.060	401.02.02.01583-8
14	MENYO'E	675.890.245	270.356.098	270.356.098	135.178.049	401.02.02.01571-0
<b>X</b>	<b>KECAMATAN PETASIA BARAT</b>					
1	TIU	649.350.028	259.740.011	259.740.011	129.870.006	401.02.02.01547-4
2	TONTOWEA	645.994.610	258.397.844	258.397.844	129.198.922	401.02.02.01549-8
3	TOGO MULYO	645.529.495	258.211.798	258.211.798	129.105.899	401.02.02.01548-6
4	MARALEE	625.930.073	250.372.029	250.372.029	125.186.015	401.02.02.01537-0
5	MONDOWE	637.623.128	255.049.251	255.049.251	127.524.626	401.02.02.01541-2
6	SAMPALOWO	628.151.714	251.260.686	251.260.686	125.630.343	401.02.02.01581-4
7	MOLEONO	635.208.339	254.083.335	254.083.335	127.041.668	401.02.02.01539-5
8	ONEPUTE	640.705.245	256.282.098	256.282.098	128.141.049	401.02.02.01574-7
9	ULU LAA	625.431.861	250.172.744	250.172.744	125.086.372	401.02.02.01622-2
10	TADAKU JAYA	620.841.886	248.336.754	248.336.754	124.168.377	401.02.02.01618-0
	<b>JUMLAH</b>	<b>78.329.651.000</b>	<b>31.331.860.400</b>	<b>31.331.860.400</b>	<b>15.665.930.200</b>	

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,  
PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI  
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN  
ANGGARAN 2023.

A. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

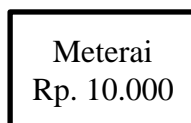
Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa .....Kec. ....

Dalam rangka pelaksanaan alokasi Dana Desa (ADD), dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
3. Akan menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan dokumen perencanaan di desa (RPJM Desa dan RKP Desa) dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Akan menggunakan Anggaran Alokasi Dana Desa setelah menetapkan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20...

Kepala Desa .....



(Nama Lengkap)

## B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa .....Kec. ....

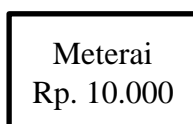
Dengan ini menyatakan bahwa saya atas nama pemerintah Desa..... Kecamatan ..... penerima Alokasi Dana Desa (ADD), telah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam APBDesa tersebut sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan dokumen perencanaan di desa (RPJM Desa dan RKP Desa) dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam APBDesa dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian keuangan daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian keuangan tersebut ke kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan ras tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20...

Kepala Desa .....



(Nama Lengkap)

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI